

Judul : Soal Rusuh Papua; Senayan Serukan Jaga Keutuhan NKRI
Tanggal : Selasa, 20 Agustus 2019
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Soal Rusuh Papua Senayan Serukan Jaga Keutuhan NKRI



Robert J Kardinal

ANGGOTA DPR Fraksi Golkar Robert J Kardinal mengajak semua pihak utamanya Pemerintah Daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk meredakan konflik yang terjadi akibat persekusi yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, dan Semarang. Peristiwa yang terjadi di tiga kota tersebut tidak akan menjalar ke Papua apabila semua pihak saling menghargai dan sama-sama menjaga keutuhan NKRI.

"Saya ajak pemerintah dan Masyarakat di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk sama-sama saling menjaga keutuhan NKRI," kata Robert yang juga Ketua Kaukus Parlemen Papua-Papua Barat, kemarin.

Robert bisa memahami kemarahan masyarakat Papua sehingga terjadi demo besar-besaran di Manokwari dan Jayapura. Dia pun berharap peristiwa di Surabaya, Malang dan Semarang bisa jadi pelajaran berharga agar peristiwa ini tidak lagi terulang di masa-masa mendatang. Bagaimanapun, masyarakat Papua hanya ingin mendapat perlakuan sama sebagai warga NKRI. Sangat ironi jika di era keterbukaan dan kemajuan teknologi saat ini, mahasiswa Papua masih mendapat perlakuan diskriminatif.

"Ke depan Pemda, TNI-Polri harus lakukan pendekatan budaya, persuasif pada mereka. Tunjukkan bahwa mereka juga merupakan Warga NKRI. Jangan lagi ada mahasiswa mereka diberlakukan diskriminatif dan dipersekusi dengan

kalimat yang sangat tidak pantas. Masyarakat Papua juga kan menerima warga pendatang dengan baik. Bahkan sudah ribuan hektare diberikan kepada warga transmigran. Di Papua mereka bisa hidup berdampingan. Tapi di Surabaya, Malang, Semarang ini malah terbalik. Padahal di sana paling 5-10 mahasiswa Papua. Di Papua itu ada ribuan pendatang tapi tidak ada konflik dan caci maki kebencian masyarakat Papua kepada pendatang," jelasnya.

Robert menyalahkan adanya caci maki dan hinaan yang diterima mahasiswa Papua yang juga berujung pada kerusakan asrama mahasiswa Papua di tiga kota tersebut. Padahal asrama yang ditempati Mahasiswa Papua tersebut sudah berdiri sejak zaman Soekarno. Pendirian asrama mahasiswa tersebut merupakan bentuk komitmen Soekarno untuk memajukan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

"Asrama Papua itu sudah ada sejak zaman Bung Karno. Bukan zaman pemerintahan sekarang. Di Jakarta saja ada 4 lokasi asrama mahasiswa Papua. Kemudian ada juga di Ciamis, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, nah itu dibangun di Pemerintahan Soekarno sebagai komitmen Pemerintah RI pada Papua waktu integrasi Papua. Bagian dari komitmen Pemerintah saat itu supaya masyarakat Papua menuntut ilmu bahkan dikirim ke luar negeri untuk belajar agar begitu lulus kembali membangun Papua," kata Robert.

Sementara, sesepuh masyarakat Papua, Freddy Numberi mengatakan, diskriminasi yang dialami mahasiswa Papua yang studi di Kota Surabaya, Malang, Semarang dan lainnya tentu menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat Papua.

"Mereka pasti memiliki perasaan bahwa tidak ada bedanya antara perlakuan kolonial Belanda dengan negara yang dicintainya Indonesia. Ibarat dimuntahkan dari mulut buaya (Belanda) masuk ke dalam mulut singa (Indonesia)," kata Freddy. ■ KAL